

Kementerian Perumahan
dan Kawasan Permukiman

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BP3KP JAWA II

TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb.

Puji syukur kami panjatkan kepada Alloh SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II (BP3KP Jawa II) menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan paling lambat 2 (dua) Minggu setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II (BP3KP Jawa II) ini merupakan capaian kinerja pada periode Tahun Anggaran 2025 dengan berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II, serta merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap rencana, sasaran, dan target dari BP3KP Jawa II Tahun Anggaran 2025.

Dengan disusunnya laporan akuntabilitas ini juga diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Kementerian PUPR.

Bandung, 08 Januari 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Jawa II



Mochamad Mulya Permana, S.T., M.T.
NIP. 197109201998031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempunyai peran strategis dalam mendukung Pembangunan Nasional melalui Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak, terjangkau, berkelanjutan, dan berkeadilan. Pembangunan perumahan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai pengungkit kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan antar wilayah.

Dalam periode pembangunan **2025–2029**, Kementerian PKP berfokus pada percepatan penyediaan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya **Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**, melalui pengurangan backlog perumahan dan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Upaya tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dengan peningkatan kualitas kawasan permukiman, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta penguatan tata kelola penyelenggaraan perumahan.

Kementerian PKP mendorong pendekatan pembangunan perumahan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, dengan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan melalui penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), fasilitasi perizinan, pendampingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Kementerian PKP juga menekankan pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mendukung penataan ruang dan pengembangan wilayah. Penanganan perumahan pascabencana dan penguatan pengelolaan hunian menjadi bagian penting dalam menjamin keberlanjutan fungsi perumahan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kementerian PKP berkomitmen untuk menerapkan prinsip **akuntabilitas kinerja, efektivitas, dan efisiensi**, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perencanaan yang terukur, pelaksanaan yang tepat sasaran, dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

Melalui pelaksanaan kebijakan dan program yang terarah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia serta mendukung tercapainya tujuan Pembangunan Nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	4
1.4. Sarana dan Prasarana.....	12
1.5. Isu Strategis.....	15
1.6. Sistematika Laporan.....	20
1.7. Outline LAKIP BP3KP Jawa II Tahun 2025.....	21
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA BP3KP JAWA II.....	23
2.1 Rencana Strategis.....	23
2.2 Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja.....	36
2.3 Metode Pengukuran Kinerja.....	49
2.4 DIPA (Uraian Rincian Timeline Pelaksanaan DIPA BP3KP Jawa II TA. 2025)....	83
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	85
3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	85
3.2 Capaian Kinerja Satker.....	86
3.3 Capaian Kinerja BP3KP Jawa II dan Satker PPKP Provinsi Jawa Barat TA. 2025.....	87
BAB 4 PENUTUP	92
4.1. Kesimpulan.....	92
4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut BP3KP Jawa II Tahun 2025	92
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia BP3KP Jawa II Menurut Jenis Jabatan	11
Tabel 2. Komposisi Pejabat Fungsional BP3KP Jawa II.....	11
Tabel 3. Cakupan Laporan Kepemilikan Rumah Dan Backlog Perumahan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	17
Tabel 4. Kerangka Pendanaan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029 Per Unit Organisasi.....	23
Tabel 5. Matriks Kerangka Target Kinerja dan Pendanaan BP3KP Jawa II Tahun 2025-2029	24
Tabel 6. Sasaran Strategis BP3KP Jawa II	27
Tabel 7. Sasaran Strategis, IKU Eselon I, dan IKP BP3KP.....	27
Tabel 8. Pelaksanaan Strategi Penyelenggaraan Perumahan 2025 – 2029.....	31
Tabel 9. Sasaran Strategis, Kegiatan/program, IKK, Kemen PKP Tahun 2025-2029	33
Tabel 10. Perubahan DIPA Sekjen pada BP3KP Jawa II TA. 2025	42
Tabel 11. Perubahan DIPA Dirjen Kawasan Permukiman pada BP3KP Jawa II TA. 2025	43
Tabel 12. Perubahan DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan pada BP3KP Jawa II TA. 2025	43
Tabel 13. Perubahan DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan pada BP3KP Jawa II TA. 2025	43
Tabel 14. Perubahan DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan pada BP3KP Jawa II TA. 2025	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perjanjian Kinerja Awal antara Sekjen dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025	38
Gambar 2 Perjanjian Kinerja Awal antara Dirjen Perumahan Perkotaan dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025	39
Gambar 3 Perjanjian Kinerja Awal antara Dirjen Perumahan Perdesaan dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025	40
Gambar 4 Perjanjian Kinerja Awal antara Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025	41
Gambar 5 Perjanjian Kinerja Awal antara Dirjen Kawasan Permukiman dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025	42
Gambar 6 Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir antara Sekjen dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025	45
Gambar 7 Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir antara Dirjen Kawasan Permukiman dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025	46
Gambar 8 Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir antara Dirjen Perumahan Perkotaan dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025	47
Gambar 9 Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir antara Dirjen Perumahan Perdesaan dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025	48
Gambar 10 Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir antara Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 (Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan).....	94
Lampiran 2 (Rapat Penjaringan Usulan Bantuan PSU Perumahan Provinsi Jawa Barat)	94
Lampiran 3 (Rapat Koordinasi II Finalisasi Pembinaan Penyelenggaraan PKP di Provinsi dan Kabupaten/Kota TA. 2025).....	94
Lampiran 4 (Rapat Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Peningkatan Pengendalian Internal)	94
Lampiran 5 (Rapat Sinkronisasi Dan Koordinasi Program Pusat – Daerah Perumahan Provinsi Jawa Barat TA 2025)	94
Lampiran 6 (PELAKSANAAN BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET)	95
Lampiran 7 (PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN) Pembangunan Rumah Susun Institut Agama Islam Tazkia Bogor Tahun Anggaran 2021-2022.....	96
Lampiran 8 (PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS).....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 9 (PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN BAGI MBR).....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 10 (PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSPS) Pelaksanaan BSPS di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2022.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 11 (Monitoring dan Evaluasi) Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rumah Susun Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rumah Khusus Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 12 (Pengawasan dan Pengendalian) Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Rumah Swadaya Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan bagian integral dari agenda Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengurangan ketimpangan sosial. Penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

RPJMN 2025–2029 menegaskan pentingnya percepatan penyediaan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui pengurangan backlog perumahan dan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), serta peningkatan kualitas kawasan permukiman. Arah kebijakan tersebut menuntut pembangunan perumahan yang tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas hunian, keterjangkauan, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan terhadap bencana.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui perencanaan berbasis data, penguatan tata kelola, serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. RENSTRA PKP menekankan pembinaan penyelenggaraan perumahan, penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), serta penguatan pemantauan dan evaluasi guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Dalam konteks tersebut, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain tingginya kebutuhan hunian layak, keterbatasan akses MBR terhadap perumahan, serta masih adanya kawasan permukiman yang belum didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan dan program yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN 2025–2029 dan dijabarkan lebih lanjut dalam RENSTRA Kementerian PKP.

Dengan demikian, Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional dan Sasaran Strategis Kementerian PKP, khususnya dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh masyarakat serta lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II (BP3KP Jawa II) berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja selama satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Penyusunan LAKIP memiliki peran yang strategis, karena memberikan informasi penting, antara lain:

1. Keberhasilan/kegagalan pencapaian output/outcome sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025;
2. Menjelaskan kinerja dan hasil-hasil yang dicapai dengan ukuran-ukuran keberhasilan merupakan indikator-indikator kinerja non keuangan;
3. Hubungan kinerja dan hasil dengan sumber daya; dan
4. Faktor-faktor kunci untuk perbaikan kinerja BP3KP Jawa II.

1.2. Tugas dan Fungsi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) merupakan unit kerja vertikal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh pejabat struktural Eselon III.a. Mengacu pada **Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian**

Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam hal ini BP3KP dibentuk sebagai ujung tombak pelaksanaan program perumahan dan permukiman, yang menjembatani kebijakan pusat dengan implementasi di lapangan, serta memastikan program berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan akuntabel.

Tugas dan Fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

1. Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BP3KP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Program Penyediaan Perumahan, antara lain:
 - Rumah Susun;
 - Rumah Khusus;
 - Rumah Swadaya (BSPS); dan
 - Perumahan umum bagi MBR.
- b. Pelaksanaan Penanganan Kawasan Permukiman, antara lain:
 - Penanganan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh pekerjaan sanitasi; dan
 - Dukungan penataan Kawasan Permukiman terpadu.
- c. Pelaksanaan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) , antara lain:
 - Mendukung kawasan perumahan umum dan bersubsidi; dan
 - Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengembang.
- d. Pendampingan dan fasilitasi teknis, antara lain:
 - Pendampingan masyarakat MBR;
 - Pendampingan pemerintah daerah dan pengembang; dan
 - Pelayanan konsultasi melalui Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, antara lain:
 - Monitoring pelaksanaan kegiatan perumahan dan permukiman;
 - Evaluasi capaian kinerja dan kualitas pembangunan; dan
 - Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kepada unit eselon I.
- f. Koordinasi dan sinergi lintas sektor, antara lain:

- Koordinasi dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota; dan
 - Sinergi dengan kementerian/lembaga, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya.
- g. Pelaksanaan administrasi balai, antara lain:
- Pengelolaan keuangan, BMN, SDM, dan tata usaha; dan
 - Dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

BP3KP berperan sebagai:

1. Pelaksana teknis kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah kerja, khususnya dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Fasilitator dan koordinator pelaksanaan program perumahan, yang menjembatani kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.
3. Pembina dan pendamping teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, terutama dalam penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).
4. Pengendali dan pemantau pelaksanaan kegiatan perumahan, melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian output dan outcome.
5. Penyedia data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman wilayah, sebagai bahan perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit eselon I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai dibantu oleh unsur pelaksana dan unsur pendukung, adapun tugas-tugasnya yaitu:

1. Kepala Balai, bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP di wilayah kerjanya, serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal / Deputi terkait melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (sesuai ketentuan organisasi).
2. Subbagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi, ketatausahaan, perlengkapan, serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan balai.
3. Seksi Penyediaan Perumahan, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penyediaan perumahan, meliputi rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya (BSPS), perumahan umum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta pendampingan teknis pembangunan perumahan.
4. Seksi Kawasan Permukiman, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, termasuk penanganan permukiman kumuh, dukungan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), serta koordinasi penataan kawasan permukiman dengan pemerintah daerah.
5. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan balai, yang melaksanakan tugas secara profesional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok Jabatan Pelaksana BP3KP merupakan kelompok pegawai ASN (PNS/PPPK) yang menduduki Jabatan Pelaksana pada BP3KP dan bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas BP3KP Jawa II terdapat Satuan Kerja BP3KP Jawa II dan Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas antara lain:

- a. Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II PPK Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) merupakan Pejabat Pembuat Komitmen yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja BP3KP. PPK Satuan Kerja BP3KP bertanggung jawab atas:

-
- Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - Penandatanganan dan pengendalian kontrak;
 - Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; dan
 - Menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kontrak dan keuangan.
- b. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) bertugas:
- Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran yang diajukan oleh PPK;
 - Menguji kesesuaian antara dokumen pembayaran dengan DIPA, perjanjian/kontrak, dan peraturan perundang-undangan;
 - Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban anggaran BP3KP;
 - Menolak dan mengembalikan dokumen pembayaran kepada PPK apabila tidak memenuhi persyaratan;
 - Melaksanakan pengendalian administrasi keuangan pada Satuan Kerja BP3KP;
 - Menyusun laporan pelaksanaan tugas PPSPM sesuai ketentuan;
 - Bertanggung jawab secara administratif atas kebenaran penerbitan SPM.
- c. Bendahara Pengeluaran bertugas:
- Melakukan pengelolaan uang persediaan dan pembayaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan uang persediaan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan.
 - Melakukan penatausahaan dan pembukuan atas seluruh transaksi pengeluaran.
 - Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara periodik.
 - Melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi pengeluaran sesuai ketentuan.
 - Menjaga keamanan uang, dokumen keuangan, dan bukti-bukti pengeluaran.
- d. PPK Perencanaan dan Pengendalian Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas:
- Menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

-
- Menyusun spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta perkiraan biaya (HPS) kegiatan sesuai kebutuhan dan standar yang berlaku.
 - Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai rencana, jadwal, mutu, dan anggaran yang ditetapkan.
 - Menyusun dan memantau rencana umum pengadaan serta memastikan keterkaitan antara perencanaan kegiatan dan pelaksanaan pengadaan.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.
 - Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan serta menyusun rekomendasi tindak lanjut dan perbaikan.
 - Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus bertugas:
- Menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, dan/atau rehabilitasi rumah susun dan rumah khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis, dan perkiraan biaya (HPS) kegiatan rumah susun dan rumah khusus.
 - Menetapkan dan mengendalikan pelaksanaan kontrak pekerjaan rumah susun dan rumah khusus sesuai jadwal, mutu, dan anggaran yang ditetapkan.
 - Melaksanakan pengendalian teknis dan administratif atas pelaksanaan pekerjaan rumah susun dan rumah khusus.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan fisik dan keuangan kegiatan rumah susun dan rumah khusus.
 - Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan rumah susun dan rumah khusus kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan kegiatan serta menyusun rekomendasi tindak lanjut.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. PPK Rumah Swadaya, Rumah Umum Komersial, dan Kawasan Permukiman bertugas:

-
- Menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, dan/atau rehabilitasi rumah swadaya, rumah umum komersial, serta kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis, dan perkiraan biaya (HPS) kegiatan rumah swadaya, rumah umum komersial, dan kawasan permukiman.
 - Menetapkan dan mengendalikan pelaksanaan kontrak pekerjaan rumah swadaya, rumah umum komersial, dan kawasan permukiman agar sesuai dengan rencana, mutu, dan anggaran.
 - Melaksanakan pengendalian teknis dan administratif atas pelaksanaan kegiatan rumah swadaya, rumah umum komersial, dan kawasan permukiman.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan fisik dan keuangan kegiatan.
 - Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan kegiatan serta menyusun rekomendasi tindak lanjut dan perbaikan.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat bertugas:
- Melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan dokumen pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Meneliti ketersediaan pagu anggaran serta kesesuaian antara tagihan dengan perjanjian/kontrak, DIPA, dan ketentuan yang berlaku
 - Melakukan pengujian hak tagih atas beban anggaran negara pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
 - Menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - Melaksanakan pengendalian administrasi pelaksanaan anggaran, khususnya terkait proses pembayaran belanja negara.
 - Menyimpan dan mengamankan dokumen SPM serta dokumen pendukung pembayaran.
 - Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas PP-SPM sesuai ketentuan.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat bertugas:
- Menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan uang persediaan dan pembayaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Melaksanakan pembayaran atas beban anggaran setelah memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM) yang sah.
 - Melakukan penatausahaan dan pembukuan seluruh transaksi pengeluaran secara tertib, akurat, dan tepat waktu.
 - Melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara periodik.
 - Menjaga keamanan uang, dokumen keuangan, dan bukti-bukti pengeluaran.
 - Melaksanakan rekonsiliasi data keuangan dengan PP-SPM dan pihak terkait.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi BP3KP Jawa II secara menyeluruh dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar 1 Struktur Organisasi BP3KP Jawa II TA. 2025

1.3.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II (BP3KP Jawa II). Keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja BP3KP Jawa II sangat ditentukan oleh ketersediaan aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, BP3KP Jawa II didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana, yang menjalankan tugas sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Penempatan dan pemanfaatan SDM dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara kompetensi, kualifikasi jabatan, dan beban kerja, guna memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

Pengelolaan sumber daya manusia di BP3KP Jawa II dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan, meliputi aspek perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, serta peningkatan disiplin dan kinerja aparatur. Upaya pengembangan kompetensi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta peningkatan kapasitas lainnya yang relevan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam konteks penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sumber daya manusia BP3KP Jawa II diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Setiap aparatur berperan aktif dalam mewujudkan sasaran kinerja melalui pelaksanaan tugas yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Meskipun secara umum dukungan sumber daya manusia telah memadai, BP3KP Jawa II masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan dinamika dan kompleksitas tugas, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan pengendalian di wilayah kerja. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia secara berkelanjutan agar kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan.

Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan berorientasi pada kinerja, BP3KP Jawa II diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya

secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan data kepegawaian BP3KP Jawa II sampai dengan Desember 2025, jumlah sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP Jawa II sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia BP3KP Jawa II Menurut Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Pejabat Struktural	2
2	Pejabat Fungsional	29
3	Jabatan Pelaksana	24
Jumlah		55

Sumber: Data Kepegawaian BP3KP Jawa II s.d. Desember 2025

1. Komposisi Pejabat Fungsional BP3KP Jawa II

Berdasarkan data kepegawaian BP3KP Jawa II sampai dengan Desember 2025, dari total 29 pejabat fungsional, komposisi jabatan fungsional didominasi oleh jabatan teknis substantif yang secara langsung mendukung pelaksanaan tugas penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, antara lain:

Tabel 2. Komposisi Pejabat Fungsional BP3KP Jawa II

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1	Perekayasa (Ahli Madya/Ahli Muda)	1
2	Penata Kelola Perumahan (Ahli Madya/Ahli Muda)	17
3	Jabatan Fungsional Teknis Lainnya	11
Jumlah		29

Sumber: Data Kepegawaian BP3KP Jawa II s.d. Desember 2025

2. Keterkaitan SDM dengan IKU BP3KP Jawa II

Komposisi sumber daya manusia BP3KP Jawa II, khususnya keberadaan pejabat fungsional teknis, memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BP3KP Jawa II. Pejabat fungsional berperan dalam pelaksanaan kegiatan teknis, fasilitasi, pendampingan, serta pengendalian kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi basis pengukuran kinerja balai.

Pada Tahun berjalan, capaian kinerja BP3KP Jawa II secara umum menunjukkan hasil yang [baik/sangat baik], dengan rata-rata capaian IKU sebesar 100%. Capaian tersebut didukung oleh ketersediaan SDM yang secara kuantitatif dan kualitatif mampu melaksanakan tugas sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Peran pejabat fungsional, khususnya pada jabatan Perekayasa dan Penata Kelola Perumahan, berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja yang berkaitan dengan:

- pelaksanaan kegiatan teknis penyediaan perumahan,
- fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan perumahan di daerah, serta
- pengendalian mutu dan capaian output kegiatan.

Sementara itu, dukungan pejabat struktural dan jabatan pelaksana memastikan terlaksananya fungsi manajerial, administrasi, dan pelaporan kinerja, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dapat berjalan secara terintegrasi sesuai prinsip SAKIP.

3. Analisis Kecukupan SDM terhadap Capaian IKU

Berdasarkan perbandingan antara komposisi SDM dan capaian IKU BP3KP Jawa II, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada tahun berjalan secara umum cukup memadai dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja. Hal ini tercermin dari capaian IKU yang berada pada kisaran 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Namun demikian, peningkatan kompleksitas kegiatan dan tuntutan kualitas output dan outcome pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memerlukan penguatan SDM, khususnya pada jabatan fungsional teknis. Optimalisasi peran pejabat fungsional melalui peningkatan kompetensi dan penataan kebutuhan SDM berbasis beban kerja menjadi faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan capaian kinerja BP3KP Jawa II pada periode selanjutnya.

1.4. Sarana dan Prasarana

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas melalui pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan salah satu pilar pendukung keberhasilan pencapaian

kinerja, khususnya dalam mendukung program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Jawa Barat.

1.4.1 Kondisi Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2025, BP3KP Jawa II telah memiliki sarana dan prasarana yang meliputi:

Gedung Kantor dan Ruang Kerja: Gedung kantor utama yang representatif dengan ruang kerja staf dan pimpinan yang memadai, dilengkapi ruang rapat, ruang arsip, dan fasilitas pendukung administrasi.

- Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Komputer, printer, server, dan perangkat IT lainnya yang digunakan untuk mendukung proses perencanaan, pelaporan, dan pengendalian kinerja.
- Kendaraan Dinas: Kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas staf dalam pelaksanaan pengawasan dan pendampingan pembangunan perumahan di lapangan.
- Akses Informasi dan Teknologi: Pemanfaatan sistem informasi manajemen perumahan dan kawasan permukiman, termasuk aplikasi pendukung monitoring dan evaluasi program.

1. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk:

- a. Mendukung kelancaran proses perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja.
- b. Memfasilitasi kegiatan koordinasi, rapat, dan konsultasi antar unit kerja maupun dengan pihak eksternal.
- c. Meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi program perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja.

2. Upaya Peningkatan dan Pemeliharaan

BP3KP Jawa II melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan sarana dan prasarana guna memastikan ketersediaan fasilitas yang layak dan berfungsi optimal. Upaya ini meliputi:

- d. Perawatan gedung kantor dan fasilitas pendukung.
- e. Pengadaan peralatan kerja yang mutakhir sesuai kebutuhan.
- f. Penataan dan pembaharuan sistem teknologi informasi untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja.

-
- g. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, BP3KP Jawa II berkomitmen untuk meningkatkan kinerja instansi dan mendukung pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai arahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Teknologi Informasi

BP3KP Jawa II memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu pilar utama untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Penggunaan teknologi informasi difokuskan pada pengelolaan data, perencanaan, pengendalian, dan pelaporan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Jawa Barat.

Pada tahun 2025, penerapan teknologi informasi di BP3KP Jawa II meliputi:

- a. Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Kawasan Permukiman
Digunakan untuk mengelola data pembangunan perumahan, pemantauan capaian program, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sistem ini memungkinkan integrasi data antarunit kerja dan memudahkan pelaporan kinerja secara real-time.
- b. Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Program
Memfasilitasi pemantauan progres kegiatan di lapangan, pencatatan hasil inspeksi, serta evaluasi capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja pendukung (IKP).
- c. Infrastruktur TI Pendukung Operasional
Terdiri atas jaringan komputer, server, perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai, serta akses internet yang stabil untuk mendukung komunikasi internal, rapat daring, dan koordinasi dengan pihak eksternal.
- d. Pemanfaatan Teknologi untuk Layanan Publik dan Transparansi.
Teknologi informasi juga digunakan untuk penyediaan informasi publik melalui portal resmi, publikasi laporan capaian kinerja, serta layanan konsultasi dan pendampingan perumahan secara digital. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, BP3KP Jawa II berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, percepatan pelaksanaan program, dan akuntabilitas kinerja, sekaligus mendukung transformasi digital instansi menuju tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.5. Isu Strategis

Beberapa permasalahan/isu strategis dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di BP3KP Jawa II tahun 2025-2029 yaitu :

- Keberadaan struktur baru yaitu BP3KP dengan tugas dan fungsinya belum dipahami oleh pihak-pihak terkait dalam proses bisnis penyelenggaraan perumahan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Belum adanya SOP yang jelas hubungan kerja antara Balai sebagai pemegang mandat Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan perumahan dengan Satker dan PPK sebagai pejabat pembendaharaan;
- Belum adanya SOP hubungan kerja dan pembagian capaian output antara Direktorat dengan Balai seperti Subdit wilayah dengan Balai;
- Belum ada SOP kegiatan swakelola yang menunjang Tugas dan Fungsi Balai;
- Belum ada SOP Kesatkeran;
- Penganggaran yang tersedia belum mendukung sepenuhnya Rencana Strategis yang telah disusun sehingga target tidak tercapai;
- Sulitnya mencapai target kinerja karena kendali capaian output dan outcome cukup dominan pada pihak diluar Balai;
- Sinkronisasi dan koordinasi dengan daerah sebagai stakeholders utama tidak berjalan dengan baik karena perbedaan program dan prioritas;
- Sumberdaya manusia untuk menjalankan tugas dan fungsi masih belum memadai baik kualitas maupun kuantitas; dan
- Metode pengadaan yang dilaksanakan berbasis pembuktian administrasi yang belum tentu bisa menggambarkan kinerja penyedia jasa yang sesungguhnya;

Beberapa Potensi yang dinilai mendukung penyelenggaraan perumahan walaupun dalam pelaksanaannya belum sempurna, yaitu:

- Sudah memiliki landasan hukum untuk BP3KP dan Satker PKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu eraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Sudah ada kinerja yang selama ini dihasilkan oleh BP2P Jawa II dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat;
- Sudah memiliki sumberdaya yang berada di Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat walaupun masih sangat terbatas;

- Sudah terdapat peraturan-peraturan menteri yang bisa menjadi acuan pelaksanaan penyelenggaraan perumahan di Balai;
- Sudah terjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan perumahan.

Beberapa Tantangan dalam penyelenggaraan perumahan adalah sebagai berikut :

- Koordinasi dan sinergisitas antara balai dan stakeholders belum optimal;
- Melakukan pembagian yang jelas dan seimbang dalam program penyelenggaraan perumahan;
- Mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kerja yang terjadi sebelum lahirnya balai;
- Terbatasnya kendali atas keberhasilan kegiatan yang dimiliki oleh balai;
- Koordinasi perijinan untuk penyediaan perumahan masih belum optimal;
- Membangun sistem yang berbasis pada manajemen risiko;
- Pengusul masih belum memahami proses pengusulan bantuan stimulan pembangunan perumahan;
- Melaksanakan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai program-program penyediaan perumahan di daerah; dan
- Permasalahan yang sangat beragam setiap kabupaten kota yang ada di wilayah kerja balai.

Sementara beberapa hal yang dianggap sebagai peluang dalam penyelenggaraan perumahan adalah sebagai berikut :

- Besarnya jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat menjadikan daya tawar menjadi tinggi dalam pemenuhan penyelenggaraan perumahan;
- Dukungan politik yang besar dalam penyelenggaraan perumahan di Provinsi Jawa Barat; dan
- Pemahaman masyarakat mengenai rumah layak huni sudah lebih meningkat.

Kondisi perumahan di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Hasil Pendataan Perumahan Tahun 2025 menunjukkan angka backlog kepemilikan rumah sebanyak 2.883.805 unit dan angka backlog kepenghunian rumah adalah sebesar 1.949.737 unit. Berdasarkan hasil pendataan perumahan Tahun 2025 jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Tahun 2025 adalah sebesar 700.387 unit sementara pada tahun 2022 adalah sebesar 156.128 unit dan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Tahun 2020 sebanyak 774.287 unit. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi

pengurangan di tahun 2020 sampai 2022, dan terjadi penambahan pada tahun 2022 sampai 2025 jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3 Cakupan Laporan Kepemilikan Rumah Dan Backlog Perumahan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Backlog		Total
		Kepemilikan	Kualitas	
1	BOGOR	280.059	494.937	774.996
2	BANDUNG	256.647	296.946	553.593
3	SUKABUMI	122.461	392.382	514.843
4	GARUT	143.032	347.415	490.447
5	CIANJUR	131.830	344.490	476.320
6	TASIKMALAYA	84.578	255.047	339.625
7	BANDUNG BARAT	84.909	185.139	270.048
8	KOTA BANDUNG	168.365	97.676	266.041
9	CIREBON	187.148	59.782	246.930
10	BEKASI	78.085	138.465	216.550
11	KARAWANG	96.028	114.725	210.753
12	CIAMIS	61.699	137.596	199.295
13	INDRAMAYU	116.392	64.399	180.791
14	SUMEDANG	67.275	102.641	169.916
15	SUBANG	88.174	74.958	163.132
16	MAJALENGKA	83.593	79.301	162.894
17	KUNINGAN	78.752	69.051	147.803
18	KOTA BEKASI	86.310	50.158	136.468
19	PURWAKARTA	52.204	73.830	126.034
20	KOTA BOGOR	73.514	52.241	125.755
21	KOTA DEPOK	73.001	43.520	116.521
22	KOTA TASIKMALAYA	58.844	55.117	113.961
23	KOTA CIMAHI	43.608	20.644	64.252
24	PANGANDARAN	16.659	42.074	58.733
25	KOTA SUKABUMI	25.560	23.503	49.063
26	KOTA CIREBON	25.503	7.797	33.300
27	KOTA BANJAR	12.480	7.964	20.444
Total		2.596.710	3.631.798	6.228.508

(Sumber: Dashboard pkp.go.id Tahun 2025)

Sementara itu kondisi rumah tidak layak huni pada akhir tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat sebesar 3.631.789 unit atau sekitar 28,04 % dari jumlah rumah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sebanyak 12.951.170 unit dengan jumlah penduduk sebesar 48.738.808 jiwa (Sumber: Dashboard pkp.go.id Tahun 2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) memiliki mandat untuk menyelenggarakan program perumahan nasional yang terintegrasi, inklusif,

dan menjamin akses hunian layak bagi seluruh masyarakat sesuai peraturan perundangan. Sasaran umumnya meliputi:

- Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Pengurangan backlog rumah tidak layak huni secara bertahap.
- Peningkatan kualitas kawasan permukiman dan akses infrastruktur dasar.
- Penyelenggaraan perumahan & permukiman yang berkelanjutan sesuai RPJMN 2025–2029.

Data BPS menunjukkan di Provinsi Jawa Barat prosentase tingkat kepemilikan rumah adalah 77,89% milik sendiri, 11,11% sewa, 10,39% bebas sewa/menumpang dan sisanya tinggal dirumah dinas dan lainnya. Kota Bandung merupakan wilayah dengan kepemilikan rumah tinggal sendiri yang terendah 53,80% diikuti oleh Kota Cimahi 56,63% ini menunjukkan baik supply dan demand mengalami kekurangan, harga rumah sudah tinggi akibat harga tanah yang melambung, lahan sudah sangat terbatas sehingga perlu melaksanakan pembangunan Rusun sebagai solusi perumahan dan permukiman. Pembangunan rumah tapak masih bisa dilaksanakan di wilayah Kabupaten tetapi harus diperhatikan aspek lingkungan dan pergerakan penduduknya.

Salah satu aspek rumah yang layak huni adalah aspek kesehatan. Berdasarkan Permen Kimpraswil, luas ruang minimum per orang adalah 9 m², sedangkan berdasarkan BPS adalah 8 m². Dengan mengacu pada standar dari BPS tersebut, persentase kepala keluarga yang menempati rumah layak huni adalah sebanyak 88,95%. Adapun persentase kecukupan ruang paling tinggi adalah di Kota Banjar dengan nilai 99,0% dan yang paling rendah adalah Kota Bandung sebesar 71,54%. Dengan melihat karakteristik tersebut, maka program rumah susun dan rumah swadaya harus bisa difokuskan pada wilayah yang tepat.

Penggunaan bahan bangunan yang berbahaya harus dihilangkan agar dapat menjadi bangunan layak huni. Salah satu bahan bangunan yang berbahaya adalah penggunaan material berbahan asbes, baik untuk dinding maupun atap. Di wilayah kerja Balai P2P J2, masih terdapat 13,63% rumah yang menggunakan asbes sebagai atap, yaitu paling banyak di Kota Bogor (48,84%), Kota Bekasi (37,25%), dan Kota Bogor (29,58%). Dengan demikian, permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian dengan melibatkan program – program dari Direktorat Rumah Swadaya.

Data BPS juga mencatat masih besarnya penggunaan dinding anyaman di wilayah tertentu pada rumah-rumah di wilayah kerja BP3KP Jawa II. Penggunaan dinding anyaman tidak serta merta menjadikan rumah tidak layak huni tetapi beberapa dinding anyaman seperti dinding anyaman bambu dan rumbia gampang mengalami kerusakan. Secara keseluruhan, terdapat 7,74% rumah tangga yang menggunakan dinding rumah dari anyaman. Di Kabupaten Cianjur, sebanyak 24,27% rumah masih menggunakan anyaman, sedangkan persentase beberapa kabupaten lainnya adalah sebanyak 23,43% di Kabupaten Garut dan 21,02% di Kabupaten Tasikmalaya. Perbaikan dinding menjadi prioritas dan penggunaan bahan yang aman, sehat dan awet perlu dipilih dalam implemtasi bantuan pemerintah, skema bantuan bisa menggunakan program dari Direktorat Rumah Swadaya.

Aspek lain dari rumah layak huni adalah aspek sanitasi. Berdasarkan data BPS baru 82,35% rumah tangga yang mempunyai fasilitas mandi cuci kakus (MCK) sendiri, 73,07% yang mempunyai septik tank dan IPAL malah untuk beberapa daerah jumlahnya lebih kecil seperti kepemilikan MCK di Kabupaten Cianjur sebesar 70,04%, Kabupaten Tasikmalaya sebesar 70,28%, dan Kabupaten Garut sebesar 73,30% demikian juga dengan penggunaan septik tank dan IPAL di beberapa daerah sangat kurang seperti di Kabupaten Sukabumi sebesar 40,07%, Kota Sukabumi sebesar 41,37% dan Kabupaten Bandung Barat sebesar 48,17% hal ini perlu program yang sesuai untuk meningkatkan perumahan warga menjadi layak huni.

Berdasarkan data-data tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa di wilayah yang padat penduduk dengan lahan yang sangat terbatas seperti Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kota Bekasi, prioritas pembangunan lebih pada bangunan bertingkat seperti Rusun. Di sisi lain, untuk kawasan penyangga kota-kota besar seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bekasi program pembangunan dapat diarahkan ke program PSU karena akan banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh pengembang untuk melayani kebutuhan perumahan di wilayah tersebut. Wilayah dengan kualitas bangunan maupun penunjangnya yang masih kurang didorongan untuk bisa melakukan perbaikan dengan program rumah swadaya. Adapun program rumah khusus diharapkan dapat berperan pada daerah-daerah dengan kepadatan rendah dan kepemilikan bangunan seperti Kabupaten Cirebon, Kota Sukabumi.

1.6. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja BP3KP Jawa II Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang jelas dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman pencapaian kinerja, penggunaan anggaran, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Sistematika penulisan Laporan Kinerja ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Kinerja terdiri atas beberapa bagian utama, yang disusun secara logis mulai dari informasi umum hingga capaian kinerja secara rinci, yaitu:

1. Kata Pengantar

Berisi ucapan syukur, komitmen pimpinan BP3KP Jawa II terhadap pencapaian kinerja, dan harapan terhadap pemanfaatan laporan ini sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.

2. Ringkasan Eksekutif

Menyajikan gambaran umum capaian kinerja BP3KP Jawa II, indikator keberhasilan, serta pencapaian sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.

3. Profil Instansi

Menjelaskan visi, misi, tugas, fungsi, struktur organisasi, serta sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang dimiliki BP3KP Jawa II.

4. Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja

Memaparkan rencana strategis, program, kegiatan, serta rencana aksi yang dilaksanakan. Bagian ini juga menyajikan hubungan antara rencana, pelaksanaan, dan indikator kinerja yang diukur.

5. Capaian Kinerja

Menyajikan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung (IKP), termasuk analisis pencapaian target dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program/kegiatan.

6. Sarana, Prasarana, dan Teknologi Informasi

Menguraikan kondisi sarana dan prasarana, pemanfaatannya dalam mendukung kinerja, serta inovasi berbasis teknologi informasi yang diterapkan dalam pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman.

7. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Memuat evaluasi internal atas pelaksanaan program dan kegiatan, analisis perbandingan capaian kinerja dengan target, serta rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

8. Penutup

Berisi kesimpulan dari capaian kinerja, komitmen instansi untuk perbaikan berkelanjutan, dan harapan agar laporan ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

9. Lampiran

Berisi data pendukung, dokumen, tabel capaian kinerja, serta dokumen referensi lain yang relevan untuk mendukung isi laporan.

Dengan sistematika penulisan yang tersusun secara logis dan komprehensif, Laporan Kinerja BP3KP Jawa II Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, transparan, dan bermanfaat bagi pengambil kebijakan, pemangku kepentingan, serta publik secara umum.

1.7. Outline LAKIP BP3KP Jawa II Tahun 2025

I. Kata Pengantar

- Ucapan syukur dan apresiasi pimpinan
- Komitmen BP3KP Jawa II dalam pencapaian kinerja
- Harapan terhadap pemanfaatan laporan

II. Ringkasan Eksekutif

- Tujuan dan Sasaran
- Isu Strategis
- Capaian Kinerja
- Realisasi Anggaran

III. DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN

IV. BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas dan Fungsi
- Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- Sarana dan Prasarana
- Isu Strategis
- Sistematika Laporan

V. BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Rencana Strategis

-
- Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja
 - Metode Pengukuran Kinerja
 - DIPA

VI. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
- Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja, Program Prioritas, Prioritas Nasional, Pantauan Kantor Staf Presiden
- Analisis Perbandingan Kinerja
- Analisis Realisasi Anggaran
- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja
- Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

VII. BAB IV PENUTUP

- Kesimpulan
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut

VIII. Lampiran

- Data pendukung capaian kinerja
- Tabel indikator dan realisasi program
- Dokumen referensi dan peraturan terkait

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA BP3KP JAWA II

2.1 Rencana Strategis

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya, baik berupa prasarana, regulasi, maupun sumber pendanaan. Sumber pendanaan Kementerian berasal dari APBN maupun Non-APBN. Indikasi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian tahun 2025–2029 adalah sebesar Rp. 142,347 Triliun. Kebutuhan ini lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan dalam resource envelope dalam RPJMN Tahun 2025–2029, yang memberikan pendanaan sebesar Rp60,2 Triliun, karena dalam penyusunan kerangka pendanaan menggunakan justifikasi asumsi berupa inflasi sektor konstruksi sebesar 5,25% per tahun dan harga satuan untuk masing masing kegiatan. Indikasi kebutuhan anggaran untuk menyelenggarakan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Program Dukungan Manajemen untuk mencapai target pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Kerangka Pendanaan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029 Per Unit Organisasi

No.	Unit Organisasi	Kebutuhan Pendanaan (Miliar Rupiah)					Total
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Sekretariat Jenderal	573	1.635	1.717	1.804	1.896	7.627
2	Inspektorat Jenderal	26	47	61	86	129	349
3	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	939	7.169	7.516	7.906	8.264	31.794
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1.284	9.970	10.491	11.084	11.589	44.419
5	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	2.385	12.752	13.101	13.973	14.590	56.801
6	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	27	92	305	410	523	1.357
Total		5.234	31.665	33.191	35.264	36.992	142.347

Dalam mendukung sasaran kegiatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak, aman, dan terjangkau serta terwujudnya kawasan permukiman yang tertata dan berkelanjutan, dilaksanakan berbagai program dan kegiatan terpadu, maka

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II melaksanakan kegiatan sebagai berikut seperti pada tabel dibawah ini:

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TOTAL
			2025	2026	2027	2028	2029		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	
SASARAN STRATEGIS 1:									
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan									
SASARAN STRATEGIS 2:									
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP									
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS									
1 Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP									
2 Indeks Integritas Kementerian PKP									
3 Tingkat Kualitas Pengawasan Intern									
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan									
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi									
OUTPUT KEGIATAN:									
	Jumlah Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman di Kawasan Permukiman	Layanan	1	1	1	1	1	5	
	Jumlah Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Layanan	1	1	1	1	1	5	
	Jumlah Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Layanan	1	1	1	1	1	5	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen									
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENYIAPAN LAHAN DAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM									
OUTPUT KEGIATAN:									
	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum								
	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Kawasan Permukiman	Unit	444					444	
KEGIATAN: PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI									
OUTPUT KEGIATAN:									
	Jumlah Unit Rumah Swadaya								
	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	385	1000	1000	1000	1000	4385	
	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perumahan Perkotaan	Unit	1279	3000	3000	3000	3000	13279	
	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaan	Unit	4710	36000	36000	36000	36000	148710	
	Jumlah rumah khusus yang terbangun								
	Jumlah rumah susun yang terbangun								
	Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	Unit	21	56	0	0	0	77	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS									
1 Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu									
KEGIATAN: PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH									
OUPUT KEGIATAN:									
	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar							
	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Perumahan Pesisir	Hektar	29,03					29,03	
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN									
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP									
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS									
Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP									
OUTPUT KEGIATAN:									
	Jumlah Layanan Umum di Sekretariat Jenderal	Layanan	1	1	1	1	1	5	

Tabel 5 Matriks Kerangka Target Kinerja dan Pendanaan BP3KP Jawa II Tahun 2025-2029

2.1.1 Visi dan Misi BP3KP Jawa II

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta RPJMN 2025–2029, BP3KP Jawa II menetapkan visi dan misi yang menjadi pedoman strategis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Jawa II.

A. Visi

“Terciptanya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah Jawa II, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.”

Visi ini mencerminkan komitmen BP3KP Jawa II untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, khususnya kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan korban bencana, dapat memperoleh hunian yang layak dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serta ramah lingkungan.

B. Misi

Misi BP3KP Jawa II dijabarkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan fasilitasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk rumah swadaya, rumah umum, rumah susun, dan rumah khusus, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan pemantauan kegiatan perumahan, sehingga output dan outcome dapat terukur dan akuntabel.
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan masyarakat, termasuk kelompok MBR, dalam pemanfaatan bantuan perumahan serta pengelolaan kawasan permukiman.
4. Mendorong koordinasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dunia usaha, dan lembaga masyarakat, untuk mewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman yang tertata dan berkelanjutan.
5. Menjamin akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran, melalui perencanaan kinerja yang terintegrasi, monitoring yang berkesinambungan, dan evaluasi periodik sesuai standar SAKIP/AKIP.

2.1.2 Tujuan Kinerja BP3KP Jawa II

BP3KP Jawa II memiliki tujuan dan sasaran kinerja yang selaras dengan visi dan misi balai, serta mendukung pencapaian target nasional RPJMN 2025–2029 dan RENSTRA Kementerian PKP. Tujuan dan sasaran ini menjadi dasar perencanaan

program, kegiatan, indikator kinerja, dan evaluasi pelaksanaan balai di wilayah Jawa II.

Tujuan Kinerja

1. Meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, aman, sehat, dan berkelanjutan di wilayah Jawa II.
2. Meningkatkan akses masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terhadap perumahan yang layak huni sesuai standar teknis dan NSPK Kementerian PKP.
3. Menjamin pelaksanaan kebijakan nasional perumahan dan kawasan permukiman secara efektif, efisien, dan akuntabel, dengan memanfaatkan anggaran secara optimal.
4. Mendorong pembangunan kawasan permukiman yang tertata dan ramah lingkungan, termasuk penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
5. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan perumahan dan permukiman, sehingga output dan outcome dapat terukur dan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

2.1.3 Sasaran Strategis BP3KP Jawa II **Sasaran Strategis**

1. Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat, termasuk MBR, korban bencana, dan masyarakat terdampak pembangunan.
2. Terwujudnya kawasan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan, sesuai standar teknis dan tata ruang.
3. Optimalisasi program bantuan perumahan dan pendampingan masyarakat, sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran dan berdampak nyata.
4. Terselenggaranya monitoring, evaluasi, dan pengendalian yang efektif, sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti.
5. Terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berjalan sinergis.
6. Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran, melalui pengelolaan kegiatan yang terencana dan terdokumentasi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Arah Target 2025–2029
1	Meningkatnya penyediaan perumahan layak bagi MBR	Jumlah unit perumahan (rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya/BSPS) yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya	Meningkat setiap tahun
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Menurun secara bertahap
3	Meningkatnya ketersediaan PSU perumahan	Jumlah kawasan perumahan yang dilengkapi PSU layak	Meningkat setiap tahun
4	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program perumahan di daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perumahan tepat waktu dan sesuai standar	≥ target kinerja tahunan
5	Meningkatnya kualitas pendampingan teknis dan layanan perumahan	Jumlah layanan pendampingan dan Klinik Perumahan yang dilaksanakan	Meningkat setiap tahun
6	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kelembagaan BP3KP	Nilai SAKIP / persentase laporan tepat waktu dan berkualitas	Meningkat menuju kategori baik
7	Meningkatnya sinergi pusat dan daerah	Jumlah kerja sama/koordinasi dengan pemerintah daerah	Meningkat setiap tahun

Tabel 6 Sasaran Strategis BP3KP Jawa II

No	Sasaran Strategis BP3KP	IKU Eselon I (Induk)	IKP BP3KP
1	Meningkatnya penyediaan perumahan layak bagi MBR	Jumlah unit perumahan layak yang disediakan bagi MBR	Jumlah unit rumah susun/rumah khusus yang dilaksanakan BP3KP
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Luas kawasan kumuh di wilayah kerja BP3KP yang tertangani
3	Meningkatnya ketersediaan PSU perumahan	Jumlah kawasan perumahan yang dilengkapi PSU layak	Jumlah lokasi/kawasan PSU yang difasilitasi BP3KP
4	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program perumahan	Persentase pelaksanaan program perumahan sesuai NSPK	Persentase kegiatan BP3KP tepat waktu dan sesuai standar
5	Meningkatnya kualitas layanan pendampingan perumahan	Jumlah layanan fasilitasi dan pendampingan perumahan	Jumlah layanan Klinik Perumahan dan pendampingan yang dilaksanakan BP3KP
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perumahan	Nilai SAKIP unit eselon I	Nilai SAKIP / ketepatan pelaporan kinerja BP3KP
7	Meningkatnya sinergi pusat dan daerah	Tingkat keterlibatan pemerintah daerah dalam program perumahan	Jumlah kegiatan koordinasi/kerja sama BP3KP dengan pemda

Tabel 7 Sasaran Strategis, IKU Eselon I, dan IKP BP3KP

Untuk mencapai Sasaran Strategis BP3KP Jawa II, dilakukan melalui serangkaian strategi, program, dan kegiatan terintegrasi yang selaras dengan kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta RPJMN 2025–2029, meliputi:

1. Penguatan Pelaksanaan Program Perumahan melalui melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya (BSPS) secara tepat sasaran bagi MBR, dan mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah di wilayah kerja BP3KP Jawa II.
2. Penanganan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan melaksanakan penanganan permukiman kumuh secara terpadu berbasis kawasan serta mendorong kolaborasi pusat-daerah dalam penataan kawasan permukiman.
3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dengan memfasilitasi penyediaan PSU perumahan umum dan bersubsidi bagi MBR dan menjamin keterpaduan PSU dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
4. Pendampingan Teknis dan Layanan Perumahan dilaksanakan dengan mengoptimalkan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai sarana konsultasi teknis dan administratif dan juga memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat.
5. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kinerja BP3KP Jawa II dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam setiap kegiatan.
6. Penguatan Koordinasi dan Sinergi dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, dan swasta serta mendorong kemitraan dalam penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman.

Untuk mencapai sasaran strategis, BP3KP Jawa II melaksanakan program penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman secara terpadu, memperkuat pendampingan teknis dan layanan perumahan, meningkatkan penyediaan PSU, serta mengoptimalkan tata kelola dan sinergi pusat-daerah guna mewujudkan hunian layak dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tercantum dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II mempunyai target menyediakan 166.818 unit rumah layak huni melalui pembangunan 166.374 unit bantuan peningkatan rumah swadaya rumah milik MBR yang belum memenuhi indikator layak huni, penanganan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Perumahan Pesisir seluas 29,03 Hektar, pembangunan rumah susun di Perumahan Perkotaan sebanyak 77 unit, serta menyediakan PSU yang melayani 444 unit rumah milik MBR.

Dalam rangka mendukung arah dan kebijakan tersebut, strategi yang akan ditempuh oleh BP3KP Jawa II antara lain:

1. Strategi Perencanaan Berbasis Data, yang meliputi:
 - Penguatan basis data perumahan dan permukiman.
 - Sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah.
 - Penajaman target dan lokasi prioritas.
2. Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola, yang meliputi:
 - Penguatan kapasitas pemerintah daerah.
 - Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
 - Penyederhanaan prosedur dan standar pelayanan.
3. Strategi Peningkatan Keterjangkauan Perumahan, yang meliputi:
 - Optimalisasi bantuan stimulan dan subsidi perumahan.
 - Pengembangan skema pembiayaan inovatif.
 - Peningkatan akses MBR terhadap hunian layak.
4. Strategi Kolaborasi dan Kemitraan, yang meliputi:
 - Sinergi lintas kementerian/lembaga.
 - Kolaborasi dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
 - Peningkatan peran dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
5. Strategi Keberlanjutan dan Ketahanan, yang meliputi:
 - Penerapan prinsip perumahan berkelanjutan.
 - Pembangunan hunian yang adaptif terhadap risiko bencana.
 - Penguatan pemeliharaan dan pengelolaan kawasan permukiman.

Adapun pelaksanaan strategi penyelenggaraan perumahan BP3KP Jawa II seperti diuraikan dalam tabel 8 di bawah ini.

No.	Strategi Utama	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja	Target 2025–2029
1.	Peningkatan Penyediaan Hunian Layak & Terjangkau	Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah (pembangunan & renovasi)	Jumlah unit rumah dibangun/direnovasi	3.000.000 rumah per tahun (termasuk baru & renovasi) sesuai RPJMN; 2 juta di perdesaan & 1 juta di perkotaan setiap tahun periode 2025–2029 Bappenas+1
2.	Percepatan	Penyaluran	Jumlah unit BSPS	Skala tahunan (mis.

	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	BSPS dan pendampingan teknis pembangunan rumah swadaya	yang terealisasi	2.000.000 unit rumah/renovasi BSPS melalui skema dukungan kebijakan dan anggaran) pkp.go.id
3.	Pengembangan Rumah Susun dan Rumah Khusus	Pembangunan rumah susun untuk MBR & kelompok tertentu - Pembangunan rumah khusus untuk segmen tertentu	Jumlah unit rumah susun & rusus	Peningkatan ketersediaan rumah vertikal & rusus sesuai kebutuhan daerah tiap tahun Bisnis Ekonomi
4.	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Fasilitasi pembiayaan melalui FLPP, KUR Perumahan, dan skema pembiayaan lain	Jumlah rumah yang mendapatkan dukungan pembiayaan rumah	Peningkatan pembiayaan perumahan bagi MBR setiap tahun (mis. peningkatan FLPP dan KUR perumahan) Reddit
5.	Penanganan Permukiman Kumuh & Infrastruktur Perumahan	Rehabilitasi permukiman kumuh & penyediaan PSU untuk kompleks perumahan	Luas permukiman kumuh yang ditangani dan PSU terbangun	Target peningkatan kualitas permukiman kumuh di lokasi prioritas nasional setiap tahunnya Kompas
6.	Pendataan, Pemantauan & Evaluasi Data Perumahan	Pemutakhiran data perumahan melalui sistem informasi (basis data kebutuhan rumah, backlog) - Monitoring kemajuan pelaksanaan	Persentase data perumahan yang terintegrasi & pelaporan berkala	Basis data terpadu (SIPKP) terbaru tiap tahun; laporan realisasi triwulan & tahunan

7.	Kemudahan Perizinan & Pendampingan Teknis	Pendampingan kemudahan perizinan pembangunan perumahan & kawasan permukiman	Waktu penyelesaian perizinan perumahan	Penyederhanaan prosedur perizinan & peningkatan kepatuhan teknis sesuai target pelayanan
8.	Kolaborasi Multistakeholder & Insentif Investasi	Koordinasi pusat–daerah, kerja sama dengan sektor swasta, BUMN, & lembaga pembiayaan	Jumlah kontrak kerja sama/insentif yang terealisasi	Peningkatan investasi sektor perumahan & partisipasi sektor swasta/BUMN setiap tahun Bisnis Ekonomi
9.	Edukasi & Perlindungan Konsumen Perumahan	Sosialisasi hak konsumen & kewajiban pengembang - Edukasi pembiayaan perumahan	Jumlah publikasi & kegiatan edukasi	Peningkatan pemahaman konsumen & pengembang terhadap peraturan pasar perumahan
10.	Penguatan Lembaga dan Kebijakan Perumahan	Penyusunan kebijakan, SOP pelaksanaan, aturan turunan perumahan - Harmonisasi regulasi	Jumlah kebijakan & aturan turunan yang ditetapkan	Peraturan strategis yang mendukung percepatan penyelenggaraan perumahan periode 2025–2029

Tabel 8 Pelaksanaan Strategi Penyelenggaraan Perumahan 2025 – 2029

2.1.4 Indikator Kinerja

Untuk mencapai Sasaran Strategis BP3KP Jawa II, dilakukan melalui serangkaian strategi, program, dan kegiatan terintegrasi yang selaras dengan kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta RPJMN 2025–2029, meliputi:

1. Penguatan Pelaksanaan Program Perumahan melalui melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya (BSPS)

secara tepat sasaran bagi MBR, dan mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah di wilayah kerja BP3KP Jawa II.

2. Penanganan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan melaksanakan penanganan permukiman kumuh secara terpadu berbasis kawasan serta mendorong kolaborasi pusat–daerah dalam penataan kawasan permukiman.
3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dengan memfasilitasi penyediaan PSU perumahan umum dan bersubsidi bagi MBR dan menjamin keterpaduan PSU dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
4. Pendampingan Teknis dan Layanan Perumahan dilaksanakan dengan mengoptimalkan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai sarana konsultasi teknis dan administratif dan juga memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat.
5. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kinerja BP3KP Jawa II dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam setiap kegiatan.
6. Penguatan Koordinasi dan Sinergi dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, dan swasta serta mendorong kemitraan dalam penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman.

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan dari suatu program. Penetapan indikator kinerja program menyesuaikan dengan sasaran dan indikator kinerja strategis dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Indikator kinerja program juga merupakan kerangka akuntabilitas dalam mengukur pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemenuhan kebutuhan rumah layak dan aman dicapai melalui penyediaan rumah layak dan terjangkau, penataan permukiman kumuh, penyediaan PSU, pendampingan teknis, penguatan tata kelola, serta sinergi pusat–daerah dan kemitraan publik-swasta, sehingga masyarakat memperoleh hunian yang aman, nyaman, dan berkelanjutan juga merumuskan kegiatan dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK) pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan adalah sesuai Tabel

No	Sasaran Strategis	Kegiatan / Program	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2025–2029
1	Meningkatkan penyediaan perumahan layak bagi MBR	Pembangunan rumah susun	Jumlah unit rumah susun yang dibangun	Sesuai target Program 3 Juta Rumah
		Pembangunan rumah khusus	Jumlah unit rumah khusus yang dibangun	Tahunan meningkat sesuai kebutuhan wilayah
		Pembangunan rumah swadaya (BSPS)	Jumlah unit BSPS yang selesai dibangun	Meningkat setiap tahun
2	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	Penanganan permukiman kumuh	Luas permukiman kumuh yang ditangani	Menurun secara bertahap per tahun
		Penataan kawasan permukiman terpadu	Jumlah kawasan permukiman yang tertata	Meningkat setiap tahun
3	Meningkatkan penyediaan PSU perumahan	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan	Jumlah kawasan perumahan yang memiliki PSU layak	Meningkat setiap tahun
4	Memperkuat pendampingan teknis perumahan	Klinik Perumahan / Layanan konsultasi teknis	Jumlah layanan pendampingan yang diberikan	Meningkat setiap tahun
5	Mempercepat Program 3 Juta Rumah	Pendataan dan akselerasi pembangunan rumah	Persentase target rumah yang terealisasi	≥ target tahunan
6	Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas	Penguatan manajemen, monitoring, dan evaluasi	Persentase kegiatan dilaksanakan sesuai standar NSPK dan SAKIP	Meningkat menuju kategori baik
7	Meningkatkan koordinasi pusat–daerah	Koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah, BUMN, dan swasta	Jumlah kegiatan koordinasi dan kerja sama	Meningkat setiap tahun

Tabel 9 Sasaran Strategis, Kegiatan/program, IKK, Kemen PKP Tahun 2025–2029

2.1.5 Arah Kebijakan Kinerja BP3KP Jawa II

Arah kebijakan kinerja BP3KP Jawa II Tahun 2025 disusun untuk memastikan seluruh program dan kegiatan organisasi selaras dengan RPJMN 2025–2029, Rencana Strategis BP3KP, serta mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kebijakan kinerja ini menekankan efektivitas pelaksanaan program, akuntabilitas penggunaan anggaran, dan orientasi pada hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat. Adapun arah kebijakan kinerja BP3KP Jawa II mencakup:

1. Peningkatan Akses dan Ketersediaan Perumahan Layak Huni
 - Memastikan pembangunan rumah layak huni sesuai standar teknis dan kebutuhan masyarakat, termasuk rumah khusus dan rumah susun.
 - Mengoptimalkan peran BP3KP sebagai fasilitator dan pendamping pemerintah daerah dalam penyediaan perumahan.
2. Penanganan Permukiman Kumuh Secara Terpadu
 - Menangani permukiman kumuh perkotaan dan pesisir dengan pendekatan integratif, melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak swasta.
 - Memprioritaskan perbaikan kualitas lingkungan, sanitasi, akses air bersih, dan infrastruktur permukiman.
3. Efektivitas Pelaksanaan Rumah Susun dan Rumah Khusus

- Memastikan rumah susun dan rumah khusus selesai dibangun tepat waktu, sesuai spesifikasi, dan dapat segera dimanfaatkan.
 - Mengintegrasikan aspek keberlanjutan, keamanan, dan kenyamanan dalam setiap proyek pembangunan.
 - Penguatan Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Pendampingan Teknis
 - Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja melalui sistem informasi dan monitoring yang akurat.
 - Memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung pembangunan perumahan dan permukiman yang sesuai standar.
4. Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran dan Sumber Daya
- Menyusun rencana kerja tahunan berbasis hasil (outcome-oriented) dan memastikan realisasi anggaran efisien dan tepat sasaran.
 - Mengurangi risiko dan hambatan pelaksanaan program melalui koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas SDM.
5. Peningkatan Inovasi dan Modernisasi Pelayanan
- Mengembangkan inovasi berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi digital monitoring proyek, dashboard kinerja, dan layanan konsultasi online.
 - Mendorong sistem manajemen kinerja yang adaptif, cepat tanggap, dan mendukung peningkatan kepuasan masyarakat.

Arah kebijakan kinerja BP3KP Jawa II tahun 2025 menekankan pelaksanaan program yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, dengan prioritas utama pada pembangunan rumah layak huni, penanganan permukiman kumuh, pembangunan rumah susun dan rumah khusus, serta penguatan layanan manajemen internal dan pendampingan teknis. Pelaksanaan kebijakan ini bertujuan mendukung visi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Jawa Barat.

2.1.6 Strategi Kinerja BP3KP Jawa II

Strategi kinerja BP3KP Jawa II dirancang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja balai yang selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan RENSTRA Kementerian PKP, khususnya terkait penyediaan rumah layak huni, pengembangan kawasan permukiman, pendampingan masyarakat, serta pengawasan dan akuntabilitas kinerja.

A. Strategi Utama

1. Strategi Penyediaan Rumah Layak Huni

- Memprioritaskan pembangunan dan perbaikan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), korban bencana, dan masyarakat terdampak pembangunan.
- Mengintegrasikan program pemerintah pusat dan daerah, seperti BSPS, rumah swadaya, rumah khusus, rumah susun, dan rumah umum.
- Menyusun rekomendasi lokasi dan alokasi bantuan rumah berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas wilayah.

2. Strategi Pengembangan Kawasan Permukiman

- Menata kawasan permukiman agar sehat, aman, ramah lingkungan, dan sesuai tata ruang.
- Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) secara terpadu.
- Mendorong pembangunan kawasan permukiman berkelanjutan yang mendukung konsep Hunian Berimbang.

3. Strategi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian

- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program perumahan dan permukiman secara rutin dan berkesinambungan.
- Mengukur capaian output dan outcome berdasarkan indikator kinerja utama (IKU/IKK).
- Memberikan masukan berbasis bukti untuk pengambilan kebijakan dan perbaikan program.

4. Strategi Pendampingan dan Koordinasi Masyarakat

- Melaksanakan pendampingan bagi penerima bantuan perumahan agar memanfaatkan fasilitas sesuai ketentuan.
- Mengoptimalkan pembentukan dan pengelolaan unit pengelola perumahan pasca bencana.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.

5. Strategi Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran

- Menjamin efisiensi penggunaan anggaran melalui perencanaan terintegrasi, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi berkala.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja sesuai standar SAKIP/AKIP.

B. Arah Kebijakan Kinerja

- Sinergi Pusat-Daerah: Seluruh program diselaraskan dengan kebijakan pusat dan kebutuhan wilayah Jawa II.
- Prioritas Rumah Layak Huni MBR: Fokus pada pemenuhan rumah rakyat sesuai standar layak huni.
- Pemanfaatan Data dan Informasi: Basis data perumahan digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan.
- Penguatan Pengawasan dan Evaluasi: Memastikan pencapaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan.
- Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman: Menjamin prasarana dan sarana permukiman sesuai NSPK dan aman bagi penghuninya.

2.2 Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

2.2.1 Perjanjian Kinerja BP3KP Jawa II Tahun 2025

Perjanjian Kinerja BP3KP Jawa II Tahun 2025 merupakan dokumen kesepakatan kinerja antara Kepala BP3KP Jawa II selaku pimpinan unit kerja Eselon III dengan pimpinan unit organisasi di atasnya pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perjanjian Kinerja ini memuat komitmen kinerja yang harus dicapai selama Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan:

- RPJMN Tahun 2025–2029,
- RENSTRA Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,
- Rencana Kerja (RENJA) BP3KP Jawa II Tahun 2025, serta
- alokasi anggaran dalam DIPA Tahun Anggaran 2025.

Perjanjian Kinerja BP3KP Jawa II Tahun 2025 berfungsi sebagai:

1. Dasar penilaian kinerja pimpinan unit kerja,
2. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan,
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja, dan
4. Bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan dan publik.

Dalam Perjanjian Kinerja tersebut ditetapkan sasaran kinerja, indikator kinerja, target tahunan, serta program dan kegiatan pendukung yang

mencerminkan peran BP3KP Jawa II dalam penyediaan perumahan layak huni, pengembangan kawasan permukiman, pendampingan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan di wilayah kerja.

2.2.2 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja BP3KP Jawa II Tahun 2025

Seiring dengan dinamika kebijakan nasional dan pelaksanaan anggaran Tahun 2025, Perjanjian Kinerja BP3KP Jawa II mengalami perubahan (reviu). Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan untuk menjaga keselarasan antara target kinerja, program/kegiatan, dan alokasi anggaran yang tersedia. Adapun kronologi perubahan Perjanjian Kinerja BP3KP Jawa II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

Pada awal Tahun Anggaran 2025, Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan DIPA yang terbit sampai dengan akhir bulan Agustus 2025 dikarenakan anggaran baru bisa dipakai efektif di bulan tersebut, dengan target kinerja dan indikator yang disesuaikan dengan rencana program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RENSTRA BP3KP Jawa II. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Jawa II TA. 2025:



The image shows a formal document titled "PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025" (Performance Agreement Year 2025) from the "KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN" (Ministry of Housing and Settlements). The document is signed by two parties: "Pihak Pertama" (First Party) and "Pihak Kedua" (Second Party). The First Party is Mochamad Mulya Permana, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II. The Second Party is Didyk Choirael, Sekretaris Jenderal. The document outlines the terms of the performance agreement for the year 2025, including the commitment to achieve targets and the role of the Second Party in supervision and evaluation. The document is dated Jakarta, 2025.

**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choirael**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

Pihak Kedua

Didyk Choirael
NIP. 197104161992011001

Pihak Pertama

Mochamad Mulya Permana
NIP. 197109201998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen	1 Tingkat dukungan manajemen	2 Layanan

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat

ANGGARAN
Rp. 1.712.580.000,00
Rp. 350.339.000,00
Rp. 2.062.919.000,00 +

SEKRETARIS JENDERAL



DIDYK CHOIROEL

Jakarta, 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II



MOCHAMAD MULYA PERMANA

Gambar 2 Perjanjian Kinerja Awal antara Sekjen dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025


KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkotaan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Sri Haryati
NIP. 197107071997032004

Jakarta, 2025

Pihak Pertama



Mochamad Mulya Permana
NIP. 197109201998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II
DIREKTORAT JENDERAL PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2 Laporan
2	Meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni di perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	1209 unit
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	1 unit
		3 Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	21 unit

KEGIATAN
1 Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat

ANGGARAN
Rp1.282.261.000,00
Rp52.349.137.000,00
Rp53.631.398.000,00 +

Jakarta, 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKOTAAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II

SRI HARYATI

MOCHAMAD MULYA PERMANA

Gambar 3 Perjanjian Kinerja Awal antara Dirjen Perumahan Perkotaan dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025


KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perdesaan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

Pihak Kedua

Imran
NIP. 197310261993021001

Pihak Pertama

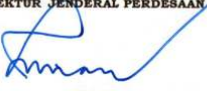
Mochamad Mulya Permana
NIP. 197109201998031003

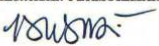
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II
DIREKTORAT JENDERAL PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan 2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan 1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	4701 unit
3	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1 Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan	1 unit

KEGIATAN
1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat

ANGGARAN
Rp. 112.334.000,00
Rp. 105.372.354.000,00
Rp. 105.484.688.000,00 +

DIREKTUR JENDERAL PERDESAAN

IMRAN

Jakarta, 2025
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II

MOCHAMAD MULYA PERMANA

Gambar 4 Perjanjian Kinerja Awal antara Dirjen Perumahan Perdesaan dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025


KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Juni 2025

Pihak Kedua

Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Pihak Pertama

Mochamad Mulya Permana
NIP. 197109201998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN

1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp 303.465.000,00

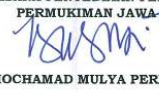
Jakarta, 24 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO



AGUS ANDRIANSYAH

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II



MOCHAMAD MULYA PERMANA

Gambar 5 Perjanjian Kinerja Awal antara Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025


KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

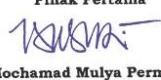
Jakarta, 31 Agustus 2025

Pihak Kedua



Fitrah Nur
NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama



Mochamad Mulya Permana
NIP. 197109201998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	426 unit
		2 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan
2	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 rekomendasi kebijakan
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1 Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	415 unit
4	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1 Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh	29,03 hektar

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat

ANGGARAN

Rp. 458.668.000,00

Rp. 21.219.682.000,00

Rp. 21.678.350.000,00 +

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



FITRAH NUR

Jakarta, 31 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II



MOCHAMAD MULYA PERMANA

Gambar 6 Perjanjian Kinerja Awal antara Dirjen Kawasan Permukiman dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025

2. Perubahan Kebijakan dan Penyesuaian Anggaran

Dalam pelaksanaannya, terdapat penyesuaian kebijakan pemerintah pusat, termasuk penajaman prioritas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta penyesuaian pagu anggaran. Kondisi tersebut berdampak pada perubahan volume kegiatan, target output, maupun jadwal pelaksanaan.

Berikut merupakan revisi DIPA BP3KP Jawa II selama TA. 2025:

DIPA	JUMLAH UANG (Rp.)	TANGGAL DISAHKAN
AWAL	50.000.000	02 Desember 2024
REVISI KE-1	1.712.580.000	11 Juni 2025
REVISI KE-2	1.712.580.000	16 Juli 2025
REVISI KE-3	1.712.580.000	20 Oktober 2025
REVISI KE-4	1.712.580.000	31 Oktober 2025
REVISI KE-5 (AKHIR)	1.712.580.000	31 Oktober 2025

Tabel 10 Perubahan DIPA Sekjen pada BP3KP Jawa II TA. 2025

DIPA DIRJEN KAWASAN PERMUKIMAN TA. 2025		
DIPA	JUMLAH UANG (Rp.)	TANGGAL DISAHKAN
AWAL	50.000.000	02 Desember 2024
REVISI KE-1	128.368.000	25 Juni 2025
REVISI KE-2	128.368.000	16 Juli 2025
REVISI KE-3	458.668.000	15 Agustus 2025
REVISI KE-4 (AKHIR)	458.668.000	16 Oktober 2025

Tabel 11 Perubahan DIPA Dirjen Kawasan Permukiman pada BP3KP Jawa II TA. 2025

DIPA DIRJEN PERUMAHAN PERDESAAN TA. 2025		
DIPA	JUMLAH UANG (Rp.)	TANGGAL DISAHKAN
AWAL	30.104.000	02 Desember 2024
REVISI KE-1	112.334.000	03 Juli 2025
REVISI KE-2	112.334.000	16 Juli 2025
REVISI KE-3 (AKHIR)	294.766.000	24 Oktober 2025

Tabel 12 Perubahan DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan pada BP3KP Jawa II TA. 2025

DIPA DIRJEN PERUMAHAN PERKOTAAN TA. 2025		
DIPA	JUMLAH UANG (Rp.)	TANGGAL DISAHKAN
AWAL	100.000.000	02 Desember 2024
REVISI KE-1	260.250.000	03 Juli 2025
REVISI KE-2	260.250.000	16 Juli 2025
REVISI KE-3	1.282.261.000	09 Agustus 2025
REVISI KE-4 (AKHIR)	1.282.261.000	17 Oktober 2025

Tabel 13 Perubahan DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan pada BP3KP Jawa II TA. 2025

DIPA DIRJEN TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO TA. 2025		
DIPA	JUMLAH UANG (Rp.)	TANGGAL DISAHKAN
AWAL	45.000.000	02 Desember 2024
REVISI KE-1	303.465.000	24 Juni 2025
REVISI KE-2	303.465.000	16 Juli 2025
REVISI KE-3 (AKHIR)	303.465.000	16 Oktober 2025

Tabel 14 Perubahan DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan pada BP3KP Jawa II TA. 2025

3. Reviu dan Penyesuaian Perjanjian Kinerja

Menindaklanjuti perubahan tersebut, BP3KP Jawa II melakukan reviu Perjanjian Kinerja untuk menyesuaikan:

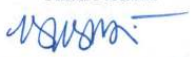
- target indikator kinerja,
- volume kegiatan,
- serta keterkaitan antara output dan outcome.

4. Penetapan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perubahan Perjanjian Kinerja ditetapkan secara resmi dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan kinerja sampai akhir Tahun 2025, serta menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja triwulanan dan LAKIP BP3KP Jawa II Tahun 2025.

Perubahan Perjanjian Kinerja ini tidak mengubah tujuan strategis BP3KP Jawa II, namun dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kinerja tetap efektif, efisien, dan akuntabel, serta sejalan dengan kebijakan terbaru Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Revisi Akhir BP3KP Jawa II TA. 2025:

REVISI TERAKHIR	
 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIC OF INDONESIA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: Mochamad Mulya Permana
Jabatan	: Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II
Selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama	: Didyk Choiroel
Jabatan	: Sekretaris Jenderal
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.	
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, Desember 2025	
Pihak Kedua  Didyk Choiroel NIP. 197104161992011001	Pihak Pertama  Mochamad Mulya Permana NIP. 197109201998031003

REVISI TERAKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen	1 Tingkat dukungan manajemen	2 Layanan

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat

ANGGARAN

Rp. 1.810.980.000,00

Rp. 1.050.227.000,00

Rp. 2.861.207.000,00 +

SEKRETARIS JENDERAL

DIDYK CHOIROEL

Jakarta, Desember 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II**

Mochamad Mulya Permana

MOCHAMAD MULYA PERMANA

Gambar 7 Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir antara Sekjen dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025

REVISI TERAKHIR

**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2025

Pihak Kedua

Fitrah Nur

Fitrah Nur
NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama

Mochamad Mulya Permana

Mochamad Mulya Permana
NIP. 197109201998031003

REVISI TERAKHIR

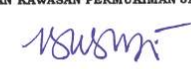
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	385 unit
		2 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
2	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 rekomendasi kebijakan
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1 Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	444 unit
4	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1 Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh	29,03 hektar

KEGIATAN
 1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II
 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat

ANGGARAN
 Rp. 458.668.000,00
 Rp. 16.972.448.000,00
Rp. 17.431.116.000,00 +


DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
FITRAH NUR

Jakarta, 30 November 2025
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II

MOCHAMAD MULYA PERMANA

Gambar 8 Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir antara Dirjen Kawasan Permukiman dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025

REVISI TERAKHIR


KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Sri Haryati
 NIP. 197107071997032004

Jakarta, Desember 2025
Pihak Pertama

Mochamad Mulya Permana
 NIP. 197109201998031003

REVISI TERAKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Rekomendasi Kebijakan
		2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2. Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1. Rekomendasi Kebijakan
		2. Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	1.279 unit
3	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1. Rekomendasi Kebijakan
		2. Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	1 unit
		3. Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	21 unit

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat

ANGGARAN

Rp. 1.282.261.000,00
Rp. 43.617.860.000,00
Rp. 44.900.121.000,00 +

DIREKTUR JENDERAL PERKOTAAN

SRI YARYATI

Jakarta, Desember 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II

MOCHAMAD MULYA PERMANA

Gambar 9 Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir antara Dirjen Perumahan Perkotaan dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025

REVISI TERAKHIR

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Imran
NIP. 197310261993021001

Jakarta, Desember 2025

Pihak Pertama

Mochamad Mulya Permana
NIP. 197109201998031003

REVISI TERAKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan 2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan 3 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan 1 Laporan 2 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	4.710 unit
3	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1 Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	1 unit

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat

ANGGARAN

Rp. 294.766.000,00
Rp. 105.798.390.000,00
Rp. 106.093.156.000,00 +

DIREKTUR JENDERAL PERDESAAN

IMRAN

Jakarta, Desember 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II

MOCHAMAD MULYA PERMANA

Gambar 10 Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir antara Dirjen Perumahan Perdesaan dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Mulya Permana**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Jakarta, 24 Juni 2025

Pihak Pertama

Mochamad Mulya Permana
NIP. 197109201998031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 303.465.000,00

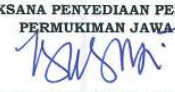
Jakarta, 24 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO



AZIS ANDRIANSYAH

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II



MOCHAMAD MULYA PERMANA

Gambar 11 Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir antara Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan Kepala BP3KP Jawa II Tahun 2025

2.3 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja BP3KP Jawa II Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, program, dan kegiatan. Metode pengukuran kinerja dilakukan secara terukur, objektif, dan berbasis indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja tahunan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja BP3KP Jawa II Tahun 2025. Indikator yang digunakan terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) yang selaras dengan sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Capaian kinerja dihitung menggunakan rumus persentase sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Hasil perhitungan capaian kinerja selanjutnya dikategorikan berdasarkan tingkat pencapaian untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala melalui laporan pelaksanaan kegiatan, sistem informasi manajemen, serta hasil monitoring dan evaluasi di lapangan. Data yang terkumpul diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi kinerja.

Hasil pengukuran kinerja dianalisis untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam pencapaian target, serta menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Dengan metode pengukuran kinerja yang sistematis dan terukur, BP3KP Jawa II berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan					
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak					
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai P3KP Jawa II	IKS K 1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	OK 1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman di Balai P3KP Jawa II Target output per

						tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomen- da si kebi- jakan 2027: 1 rekomen- da si kebi- jakan 2029: 1 rekomen- da si kebi- jakan 2026: 1 rekomen- da si kebi- jakan 2028: 1 rekomen- da si kebi- jakan Total : 5 rekomen- da si kebi- jakan		
				OK 2	Jumlah dokumen data dan informasi penyeleng- garaan kawasan permukima- n	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyeleng- garaan kawasan permukima- n oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyeleng- garaan kawasan permukima- n di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen	Non Kumulatif	Inter- nal

						2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen		
				OK 3	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2027: 2 laporan 2029: 2 laporan 2026: 2 laporan 2028: 2 laporan Total : 10 laporan	Non Kumulatif	Internal

				OK 4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
				OK 5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II	Non Kumulatif	Internal

						Capaian = Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 kegiatan 2027: - kegiatan 2029: - kegiatan 2026: - kegiatan 2028: - kegiatan Total : 1 kegiatan		
				OK 6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan	Non Kumulatif	Internal

						perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan		
				OK 7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut:	Non Kumulatif	Internal

						2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total: 4 dokumen		
				OK 8	Jumlah laporan kegiatan pemantaua n dan evaluasi penyelengg araan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kegiatan pemantaua n dan evaluasi penyelengg araan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi laporan kegiatan pemantaua n dan evaluasi penyelengg araan perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2027: 2 laporan 2029: 2 laporan 2026: 2 laporan 2028: 2 laporan Total: 9 laporan	Non Kumulatif	Inter nal

				OK 9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4	Non Kumulatif	Internal
--	--	--	--	-----------------	---	---	---------------	----------

						rekomen da si kebijakan		
				OK 10	Jumlah laporan pemantau an, evaluasi dan pelaporan penyeleng garaan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantau an, evaluasi dan pelaporan penyeleng garaan perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantau an, evaluasi dan pelaporan penyeleng garaan perumahan perkotaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 2 laporan 2029: 2 laporan 2026: 2 laporan 2028: 2 laporan Total: 8 laporan	Non Kumulatif	Inter nal
Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum								
SK 1	Meningkat nya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian	IKSK 1	Persentase rumah yang mendapat pembangu nan prasarana, sarana dan	OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangu nan prasarana, sarana, dan	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangu	Non Kumulatif	Inter nal

	perumahan di Balai P3KP Jawa II		utilitas umum		utilitas umum <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	nan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 289 unit 2027: 4.230 unit 2029: 4.230 unit 2026: 4.230 unit 2028: 4.230 unit Total : 17.209 unit		
		IKSK 2	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	OK 2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rumah	Non Kumulatif	Internal

					Perumahan Perkotaan)	yang mendapat pembangu nan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 1.000 unit 2029: 1.000 unit 2026: 1.000 unit 2028: 1.000 unit Total: 4.000 unit		
		IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaa n, pemrogram an, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU	OK 3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU oleh Balai P3KP Jawa IICapaian = Jumlah realisasi dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU di Balai P3KP Jawa IITarget output per tahun sebagai berikut:202 5: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen2 026: - dokumen 2028: 1	Non Kumulatif	Inter nal

						dokumen Total: 3 dokumen		
				OK 4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total: 4 dokumen	Non Kumulatif	Inter nal
				OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan oleh Balai	Non Kumulatif	Inter nal

						P3KP Jawa II. Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total: 4 dokumen		
				OK 6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan program,	Non Kumulatif	Internal

						anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan		
Kegiatan 3: Penyediaan Rumah Layak Huni								
SK 1	Meningkatnya ketersediaan layak huni	IKSK 1	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	OK 1	Jumlah unit rumah swadaya <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun	Non Kumulatif	Internal

						sebagai berikut: 2025: 4.847 unit 2027: 36.449 unit 2029: 36.449 unit 2026: 36.449 unit 2028: 36.449 unit Total : 150.643 unit		
		IKSK 2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 2.650 unit 2029: 2.650 unit 2026: 2.650 unit 2028: 2.650 unit Total : 10.600 unit	Non Kumulatif	Internal
				OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun (Pendanaan dilaksanakan	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Balai	Non Kumulatif	Internal

					an melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 44 unit 2027: 616 unit 2029: 616 unit 2026: 572 unit 2028: 616 unit Total : 2.464 unit		
		IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaa n, pemrogram an, dan fasilitasi peningkata n kualitas rumah dan pengemba ngan kawasan permukima n	OK 4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penangana n Kumuh dan Pengemba ngan Kawasan Permukima n	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan penangana n kumuh dan pengemba ngan kawasan permukima n oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi laporan penyiapan penangana n kumuh dan pengemba ngan kawasan permukima n di Balai P3KP Jawa	Non Kumulatif	Inter nal

						II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 4 laporan			
					OK 5	Jumlah Laporan Pemantaua n, Evaluasi dan Pelaporan Pembangu nan Rusun, Peningkata n Kualitas dan Penangana n Kumuh	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantaua n, evaluasi dan pelaporan pembangu nan rusun, peningkata n kualitas dan penangana n kumuh oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantaua n, evaluasi dan pelaporan pembangu nan rusun, peningkata n kualitas dan penangana n kumuh di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2	Non Kumulatif	Inter nal

						laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total: 2 laporan		
				OK 6	Jumlah laporan pemantaua n dan evaluasi penyelengg araan pembangu nan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantaua n dan evaluasi penyelengg araan pembangu nan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantaua n dan evaluasi penyelengg araan pembangu nan perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Inter nal

				OK 7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
				OK 8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan	Non Kumulatif	Internal

						n kualitas perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan		
				OK 9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai P3KP Jawa II	Non Kumulatif	Internal

						Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 4 laporan		
				OK 10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan di Balai P3KP Jawa II	Non Kumulatif	Internal

						Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan		
				OK 11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi si	Non Kumulatif	Internal

						kebijakan2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan		
Kegiatan 4: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan								
SK 1	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	IKSK 1	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau	OK 1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Dihitung dari rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4	Non Kumulatif	Internal

						rekomen dasi kebijakan		
SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh								
Kegiatan 1: Penanganan Permukiman Kumuh								
SK 1	Meningkat nya luasan permukima n kumuh yang ditangani secara terpadu	IKSK 1	Persentase luasan permukima n kumuh yang ditangani secara terpadu	OK 1	Luas permukima n kumuh yang ditangani secara terpadu <i>(Pendanaa n dilaksanak an melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Capaian dihitung dari perbanding an luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian = Realisasi penangana n kumuh oleh Balai P3KP Jawa II Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2025: 22 Ha 2027: 20 Ha 2029: - Ha 2026: - Ha 2028: - Ha Total: 42 Ha	Non Kumulatif	Inter nal
SASARAN PROGRAM 3: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SK 1	Meningkat nya kinerja keterpadua n, kemitraan, pemrogram an, penganggar an,	IKSK 1	Tingkat kinerja keterpadua n, kemitraan, pemrogram an, penganggar an,	OK 1	Jumlah laporan pemantaua n dan pendampin gan tata kelola dan pengendali an risiko	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantaua n dan pendampin gan tata	Non Kumulatif	Inter nal

	pemantau n dan evaluasi dalam penyeleng araan tata kelola dan pengendali an risiko perumahan dan kawasan permukima n		pemantau n dan evaluasi dalam penyeleng araan tata kelola dan pengendali an risiko perumahan dan kawasan permukima n			kelola dan pengendali an risiko oleh Balai P3KP Jawa II mulai tahun 2026 Capaian = Realisasi laporan pemantau n dan pendampin gan tata kelola dan pengendali an risiko di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 4 Laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan		
SK 2	Meningkat nya dukungan kebijakan keterbukaa n publik penyeleng araan perumahan dan kawasan permukima n yang efektif dan akuntabel	IKSK 2	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaa n publik penyeleng araan perumahan dan kawasan permukima n yang efektif dan akuntabel	OK 1	Jumlah pembangu nan dan penerapan zona integritas	Dihitung dari realisasi jumlah rekomenda si kebijakan penerapan zona integritas di Balai P3KP Jawa II Capaian = Realisasi rekomenda si kebijakan pembangu nan dan penerapan zona integritas di Balai P3KP Jawa II Target	Non Kumulatif	Inter nal

						output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan		
SK 3	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	IKSK 3	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	OK 1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Dihitung dari realisasi jumlah penerapan Manajemen Risiko di Balai P3KP Jawa II Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan penerapan Manajemen Risiko di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5	Non Kumulatif	Internal

						rekomenda si kebijakan		
				OK 2	Jumlah Pelaksanaa n Sistem Manajeme n Anti Penyuapan	Dihitung dari realisasi jumlah pelaksanaa n Sistem Manajeme n Anti Penyuapan di Balai P3KP Jawa II Capaian = Realisasi rekomenda si kebijakan pelaksanaa n Sistem Manajeme n Anti Penyuapan di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi si kebijakan 2027: 1 rekomendasi si kebijakan 2029: 1 rekomendasi si kebijakan 2026: 1 rekomendasi si kebijakan 2028: 1 rekomendasi si kebijakan Total : 4 rekomendasi si kebijakan	Non Kumulatif	Inter nal
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN								
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai P3KP Jawa II								
Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Balai P3KP Jawa II								

SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai P3KP Jawa II	IKSK 1	Tingkat layanan dukungan manajemen Balai P3KP Jawa II	OK 1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan perkantoran oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan perkantoran di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total : 10 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 layanan 2027: 2 layanan 2029: 2	Non Kumulatif	Internal

						layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total : 10 layanan		
				OK 3	Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Kawasan Permukiman)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total: 8 layanan	Non Kumulatif	Inter nal
				OK 4	Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Perumahan Perdesaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut:	Non Kumulatif	Inter nal

						2025: - layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total: 8 layanan		
				OK 5	Jumlah Layanan Umum(<i>Ditjen Perumahan Perkotaan</i>)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai P3KP Jawa IICapaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai P3KP Jawa IITarget output per tahun sebagai berikut:202 5: - layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan202 6: 2 layanan 2028: 2 layanan Total: 8 layanan	Non Kumulatif	Inter nal
				OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal (<i>Sekretariat Jenderal</i>)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Balai P3KP Jawa II	Non Kumulatif	Inter nal

						Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total : 10 layanan		
				OK 7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Kawasan Permukiman)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
				OK 8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai	Non Kumulatif	Internal

						P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan		
				OK 9	Jumlah Layanan Data dan Informasi <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2	Non Kumulatif	Internal

						layanan 2028: 2 layanan Total: 8 layanan		
				OK 10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Kawasan Permukiman)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Inter nal
				OK 11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan	Non Kumulatif	Inter nal

						2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan		
					OK 12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i> Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Balai P3KP Jawa II Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Balai P3KP Jawa II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total: 8 layanan	Non Kumulatif	Internal

2.4 DIPA (Uraian Rincian Timeline Pelaksanaan DIPA BP3KP Jawa II TA. 2025)

I. Triwulan I (Januari–Maret)

Pada triwulan I, belum ada kegiatan dilaksanakan, dikarenakan:

- Kementerian baru terbentuk pada oktober tahun 2024 masih dalam masa transisi dari Kemen PUPR;
- Belum adanya SK Pengangkatan pejabat perbendaharaan Balai;
- Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman belum ada sehingga belum ada acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan;

II. Triwulan II (April–Juni)

Pada triwulan II, belum ada kegiatan dilaksanakan, dikarenakan:

- Kementerian baru terbentuk pada oktober tahun 2024 masih dalam masa transisi dari Kemen PUPR;
- Belum adanya SK Pengangkatan pejabat perbendaharaan Balai; dan
- Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman belum ada sehingga belum ada acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan;

III. Triwulan III (Juli–September)

Pada triwulan III, kegiatan difokuskan pada persiapan dan pelaksanaan, awal kegiatan meliputi:

- Persiapan dan perencanaan pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik;
- Percepatan pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik;
- Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman belum ada baru berupa draft sehingga belum ada acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan;
- Belum adanya Perjanjian Kinerja sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- Penyesuaian pelaksanaan kegiatan apabila diperlukan; dan
- Penyusunan laporan kinerja dan realisasi anggaran Triwulan III.

IV. Triwulan IV (Oktober–Desember)

Pada triwulan IV, kegiatan difokuskan pada penyelesaian kegiatan dan evaluasi akhir, meliputi:

- Penyelesaian seluruh kegiatan sesuai target dan kontrak;
- Finalisasi penyerapan anggaran;
- Evaluasi capaian kinerja dan penggunaan anggaran;
- Penyusunan Laporan Kinerja BP3KP Jawa II Tahun 2025; dan
- Penyusunan laporan keuangan dan dokumen pertanggungjawaban.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: (1) meningkatnya kinerja (2) meningkatnya akuntabilitas. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja terdiri dari kegiatan : Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, Pengembangan sistem manajemen kinerja, dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam kaitannya dengan kebijakan reformasi birokrasi saat ini, capaian akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah menjadi suatu hal yang penting dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mewujudkan Good Governance tersebut, pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah akuntabilitas, yang diberi pengertian sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui akuntabilitas dari kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara periodik wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan saat ini sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka masyarakat juga berhak mengetahui akuntabilitas kinerja dari suatu instansi pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian PUPR terus menerus dilakukan, mulai dari menyempurnakan sistem akuntabilitas kinerja, menyusun dan menerapkan sistem manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja, sistem monitoring dan evaluasi, sampai kepada penyusunan indikator kinerja.

Laporan Kinerja BP3KP Jawa II TA 2025 ini, berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Perumahan

dan Kawasan Permukiman dan program dukungan manajemen selama periode tahun 2025, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Dokumen Renstra BP3KP Jawa II tahun 2025-2029. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat TA 2025 dalam mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Perumahan Rakyat.

3.2 Capaian Kinerja Satker

Secara umum seluruh sasaran BP3KP Jawa II TA 2025 tercapai sesuai dengan rencana dan berhasil dengan baik. Dalam hal pemanfaatan anggaran, sebagian besar telah dilaksanakan secara efisien. Capaian kinerja ini telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) BP3KP Jawa II TA 2025. Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat, mengalami perubahan Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya perubahan target yang akan dicapai dan juga adanya perubahan pihak yang bertanda tangan dalam perjanjian kinerja yaitu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II. Perubahan target Kinerja yang akan dicapai yaitu :

- a. Jumlah target output Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang semula 6.336 unit menjadi 6.374 unit;
- b. Jumlah target output Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang semula 415 unit menjadi 444 unit;

Semua sasaran strategis yang ditargetkan oleh BP3KP Jawa II Tahun Anggaran 2025, pada dasarnya dapat dicapai dengan baik. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3.3 Capaian Kinerja BP3KP Jawa II dan Satker PPKP Provinsi Jawa Barat TA. 2025

Sasaran ini dimaksudkan untuk menghasilkan laporan hasil Perencanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman selama tahun 2025 yang di dalamnya terdapat berbagai capaian kinerja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan yang dapat dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan untuk mendukung terhadap program **3 Juta Rumah** yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sehingga diharapkan terwujudnya pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan optimal. Adapun capaian kinerja tersebut di atas selama tahun 2025, adalah sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Balai P3KP Jawa II TA. 2025

1. DIPA Sekretariat Jenderal

No.	Nama Paket	Output	Jenis Pengadaan	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	1 Layanan	Swakelola	383.447.000	381.020.151	99,37	100
2	Langganan Daya dan Jasa	1 Layanan	Swakelola	161.520.000	153.243.367	94,88	100
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	Swakelola	806.986.000	803.586.350	99,58	100
4	Honor Pengelola Keuangan	1 Laporan	Swakelola	409.179.000	406.546.000	99,36	100
5	Persiapan Likuidasi	1 Laporan	Swakelola	49.848.000	40.235.355	80,72	100
TOTAL				1.810.980.000	1.784.631.223	98,55	100

Tabel 16. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja BP3KP Jawa II DIPA Sekjen TA. 2025

2. DIPA Ditjen Kawasan Permukiman

No.	Nama Paket	Output	Jenis Pengadaan	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh BP3KP Jawa II	1 Laporan	Swakelola	244.461.000	228.226.405	93,36	100
2	Pelaksanaan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman Balai P3KP Jawa II	1 Layanan	Swakelola	50.000.000	27.755.109	55,51	100

3	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	Swakelola	164.207.000	155.058.498	94,43	100
TOTAL				458.668.000	411.040.012	89,62	100

Tabel 17. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja BP3KP Jawa II DIPA Ditjen Kawasan Permukiman TA. 2025

3. DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan

No.	Nama Paket	Output	Jenis Pengadaan	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1 Laporan	Swakelola	54.176.000	44.050.171	81,31	100
2	MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	1 Laporan	Swakelola	58.158.000	53.218.384	91,51	100
3	PEMANTAUAN DAN EVALUASI BSPS	1 Laporan	Swakelola	182.432.000	181.456.647	99,47	100
TOTAL				294.766.000	278.725.202	94,56	100

Tabel 18. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja BP3KP Jawa II DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan TA. 2025

4. DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan

No.	Nama Paket	Output	Jenis Pengadaan	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah	1 Rekomendasi	Swakelola	394.645.000	394.645.000	365.576.681	92,63	100
2	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi	Swakelola	262.235.000	262.235.000	232.851.753	88,8	100
3	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi	Swakelola	312.470.000	312.470.000	202.107.141	64,68	100
4	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	1 Laporan	Swakelola	312.911.000	312.911.000	236.467.000	75,57	100
TOTAL				1.282.261.000	1.282.261.000	1.037.002.575	80,87	100

Tabel 19. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja BP3KP Jawa II DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan TA. 2025

5. DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No.	Nama Paket	Output	Jenis Pengadaan	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Penerapan Manajemen Risiko	1 Rekomendasi	Swakelola	176.932.000	176.932.000	172.075.307	97,26	100
2	Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Jawa II	1 Rekomendasi	Swakelola	126.533.000	126.533.000	125.072.984	98,85	100
TOTAL				303.465.000	303.465.000	297.148.291	97,92	100

Tabel 20. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja BP3KP Jawa II DIPA Ditjen TKPR TA. 2025

B. Capaian Kinerja Satker PPKP Provinsi Jawa Barat TA. 2025

Secara umum seluruh sasaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat TA. 2025 tercapai sesuai dengan rencana dan berhasil dengan baik. Dalam hal pemanfaatan anggaran, sebagian besar telah dilaksanakan secara efisien. Capaian kinerja ini telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat TA. 2025. Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat, mengalami perubahan Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya perubahan target yang akan dicapai. Perubahan target Kinerja yang akan dicapai yaitu :

- Jumlah target output Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang semula 6.336 unit menjadi 6.374 unit;
- Jumlah target output Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang semula 415 unit menjadi 444 unit;

Semua sasaran yang ditargetkan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat TA. 2025, pada dasarnya dapat dicapai dengan baik. Sasaran-sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatnya Dukungan Manajemen;
2. Meningkatnya Kinerja perencanaan, pemrograman, evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni;
3. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Kawasan Permukiman;
4. Terselenggaranya Kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni;
5. Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
6. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
7. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di wilayah Perkotaan;
8. Meningkatnya ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan;
9. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
10. Meningkatnya ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan.

Adapun capaian kinerja satker tersebut di atas selama tahun 2025, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Progress (%)
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas, dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	385 unit	385 unit	100

3	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	4710 unit	4704 unit	99,87
4	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	1279 unit	1278 unit	99,92
5	Jumlah rumah khusus mitigasi bencana yang dibangun	1 unit	1 unit	100
6	Jumlah rumah susun yang dibangun	22 unit	22 unit	100
7	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	444 unit	444 unit	100
8	Penataan Kawasan Kumuh	29,03 Ha	29,03 Ha	100

Tabel 21. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat TA 2025

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak tercapai, antarlain:

- a. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan tidak tercapai dikarenakan adanya 6 Penerima Bantuan BSPS mengundurkan diri setelah penetapan SK PPK dengan total bantuan tidak dapat terserap sebesar Rp. 234.460.000 dan dikembalikan kepada kas negara.
- b. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan tidak tercapai dikarenakan adanya 1 Penerima Bantuan BSPS mengundurkan diri setelah penetapan SK PPK dengan total bantuan tidak dapat terserap sebesar Rp. 88.920.000 dan dikembalikan kepada kas negara.

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

BP3KP Jawa II Tahun Anggaran 2025 berhasil melaksanakan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan efisien, dengan capaian indikator kinerja utama di atas rata-rata nasional. Keberhasilan ini didorong oleh perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, pemanfaatan informasi kinerja berbasis data, SDM kompeten, koordinasi antar unit, serta monitoring dan evaluasi berkala. Kendala yang ditemui, seperti keterbatasan kapasitas SDM, keterlambatan pelaksanaan fisik, integrasi data yang belum optimal, faktor eksternal, dan keterbatasan alokasi anggaran di beberapa program, menjadi dasar perbaikan strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja pada tahun berikutnya.

4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut BP3KP Jawa II Tahun 2025

1. Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran

- Memperkuat integrasi antara Renstra, Renja, DIPA, dan Perjanjian Kinerja untuk memastikan target program lebih realistis dan terukur.
- Menyusun alokasi anggaran yang lebih prioritas dan fleksibel sesuai kebutuhan lapangan untuk mempercepat pencapaian output dan outcome.

2. Penguatan Pemanfaatan Informasi Kinerja

- Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi kinerja dan teknologi digital untuk monitoring realisasi program, evaluasi capaian, dan penyusunan laporan.
- Menstandarisasi format dan kualitas data dukung dari setiap unit untuk mempermudah konsolidasi dan analisis kinerja.

3. Peningkatan Kapasitas SDM

- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan manajemen kinerja, pengolahan data, dan evaluasi program.
- Memperkuat peran unit fungsional dan teknis dalam mendukung pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja berbasis bukti (evidence-based).

4. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan

- Memperbaiki mekanisme pengadaan barang/jasa dan koordinasi antar unit agar proses pelaksanaan fisik lebih cepat dan tepat waktu.
- Mengidentifikasi risiko dan hambatan lapangan lebih awal agar tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan secara cepat.

5. Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas

- Menetapkan indikator capaian yang lebih jelas dan terukur untuk semua program/kegiatan.
- Melaksanakan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat.
- Memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan strategi dan perencanaan di tahun berikutnya.

6. Sinergi dan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan lain agar program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
- Memperkuat komunikasi antar unit di BP3KP Jawa II untuk mendukung pengambilan keputusan cepat dan akurat.

7. Kesimpulan:

Rekomendasi dan tindak lanjut ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja BP3KP Jawa II pada tahun 2026, dengan fokus pada perencanaan lebih matang, pemanfaatan informasi yang optimal, peningkatan kapasitas SDM, percepatan pelaksanaan kegiatan, dan penguatan koordinasi antar unit serta stakeholder.

LAMPIRAN

Lampiran 1 (Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan)

Verifikasi Teknis PSU TA. 2025



Lampiran 2 (Rapat Penjaringan Usulan Bantuan PSU Perumahan Provinsi Jawa Barat)

Lampiran 3 (Rapat Koordinasi II Finalisasi Pembinaan Penyelenggaraan PKP di Provinsi dan Kabupaten/Kota TA. 2025)

Lampiran 4 (Rapat Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Peningkatan Pengendalian Internal)

Lampiran 5 (Rapat Sinkronisasi Dan Koordinasi Program Pusat – Daerah Perumahan Provinsi Jawa Barat TA 2025)

Lampiran 6 (PELAKSANAAN BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET)

Dokumentasi Serah Terima Aset BMN	Keterangan
	Serah Terima Aset BMN Rumah Susun Yayasan Bina Insan Mulia Kab. Cirebon TA. 2025
	Serah Terima Aset BMN Rumah Khusus Korban SPAM Kab. Bekasi TA. 2025

	Serah Terima Aset BMN Rumah Khusus Korban SPAM Kab. Bekasi TA. 2025
	Serah Terima Aset BMN Rumah Susun Yayasan Aisyiyah Boarding School Kab. Bandung TA. 2025

Lampiran 7 (PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN) Pembangunan Rumah Susun Institut Agama Islam Tazkia Bogor Tahun Anggaran 2021-2022

Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan	Keterangan
-------------------------------------	------------



**PROGRESS
FISIK 0%**